

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN
BOJONEGORO MELALUI INDEKS MAQASHID SYARIAH TAHUN
2019-2023**

SKRIPSI

OLEH

RIZA MAGHFIROH

NIM : 08040421182



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2025

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya, Riza Maghfiroh, 08040421182, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 4-Juni-2025



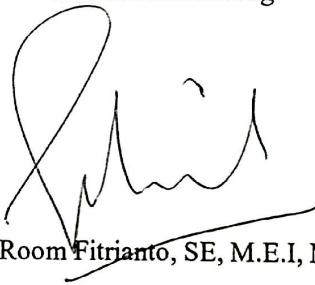
Riza Maghfiroh

NIM. 08040421182

Surabaya, 27 Februari 2025

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Achmad Room Fitrianto', written over a horizontal line.

Achmad Room Fitrianto, SE, M.E.I, MA, Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN
BOJONEGORO MELALUI INDEKS MAQASHID SYARIAH TAHUN
2019-2023**

Oleh
Riza Maghfiroh
NIM: 08040421182

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 4 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji

1. Achmad Room Fitrianto, SE,
MEI, MA, Ph.D
NIP. 197706272003121002
(Penguji 1)
2. Dr. Bakhrul Huda, Lc., M. E.I
NIP. 198509042019031005
(Penguji 2)
3. Rianto Anugerah Wicaksono, S.
T., M. SEI.
NIP. 198508222019031011
(Penguji 3)
4. Ashari Lintang Yudhanti,
M.Ak.
NIP. 199411082019032021
(Penguji 4)

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....



Surabaya, 4 Juni 2025

Dekan,

Dr. Surajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Riza Maghfiroh
NIM : 08040421182
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail address : rizamaghfiroh438@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten
Bojonegoro Melalui Indeks Maqasid Syariah Tahun 2019-2023

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 - Agustus - 2025

Penulis



(Riza Maghfiroh)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan mempertimbangkan peran Indeks Maqasid Syariah (IMS) sebagai variabel moderasi. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya efektivitas belanja daerah dalam menciptakan kemaslahatan publik yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks otonomi fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan tahunan BPKAD Kabupaten Bojonegoro periode 2019–2023. Analisis data dilakukan dengan uji regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan alat bantu SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. DAU memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan, sedangkan PAD berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, Indeks Maqasid Syariah tidak secara langsung memoderasi hubungan DAU terhadap belanja modal, tetapi memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal. Skor IMS dihitung berdasarkan lima dimensi maqasid syariah: Hifz al-Din, al-Nafs, al-‘Aql, al-Nasl, dan al-Mal, dengan mengacu pada teori Houssein Eddine Bedoui.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai maqasid syariah dalam penganggaran daerah dapat meningkatkan kualitas belanja publik. Pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan PAD secara lebih produktif dan berkeadilan dengan berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian ini juga merekomendasikan penerapan pengukuran IMS secara lebih sistematis dalam perencanaan keuangan daerah.

Kata kunci : *Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Indeks Maqasid Syariah, Kabupaten Bojonegoro*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of General Allocation Fund (DAU) and Local Original Revenue (PAD) on Capital Expenditure of Bojonegoro Regency Government by considering the role of Maqasid Syariah Index (IMS) as a moderating variable. The background of this study is based on the importance of the effectiveness of regional spending in creating public welfare that is in line with sharia principles, especially in the context of regional fiscal autonomy. This study uses a quantitative approach with secondary data from the annual financial report of BPKAD Bojonegoro Regency for the 2019–2023 period. Data analysis was carried out using multiple linear regression tests and Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS tools.

The results of the study show that DAU and PAD have a significant effect on capital expenditure. DAU has a positive but insignificant effect, while PAD has a positive and significant effect. Meanwhile, the Maqasid Syariah Index does not directly moderate the relationship between DAU and capital expenditure, but strengthens the effect of PAD on capital expenditure. The IMS score is calculated based on five dimensions of maqasid sharia: Hifz al-Din, al-Nafs, al-‘Aql, al-Nasl, and al-Mal, referring to Houssein Eddine Bedoui’s theory.

This study concludes that the integration of maqasid sharia values in regional budgeting can improve the quality of public spending. Regional governments are expected to optimize PAD more productively and fairly by focusing on the public interest. This study also recommends the application of IMS measurements more systematically in regional financial planning.

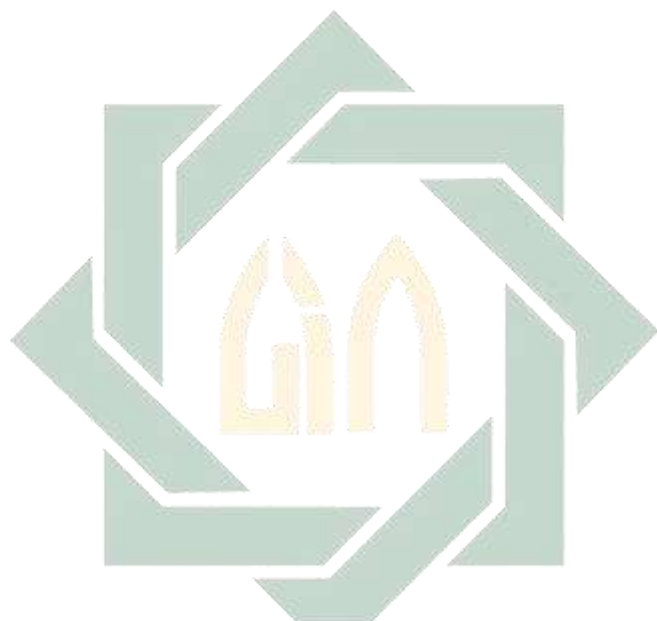
Keywords: *General Allocation Fund, Local Original Income, Capital Expenditure, Maqasid Sharia Index, Bojonegoro Regency*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI.....	iv
DECLARATION	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	10
LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Kajian Pustaka	10
2.1.1 Dana Alokasi Umum.....	10
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah	16
2.1.3 Belanja Modal.....	29
2.1.4 Maqāṣid Al-Syarī‘ Ah.....	34
2.1.5 Indeks Maqāṣid Al-Syarī‘ Ah.....	39
2.2 Penelitian Terdahulu	52

2.3 Kerangka Konseptual.....	56
2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian.....	57
BAB III.....	59
METODE PENELITIAN.....	59
3.1 Jenis Penelitian	59
3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian	59
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel (Kuantitatif).....	59
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	64
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.6 Teknik Analisis Data	65
3.7 Uji Asumsi Klasik	66
3.8 Teknik Analisis Regresi Linier Berganda.....	68
3.9 Pengujian Hipotesis	69
3.10 Metode Pengukuran Indeks Maqasid Syariah (IMS).....	71
BAB IV.....	75
HASIL DAN PEMBAHASAN	75
4.1 HASIL PEMBAHASAN	75
4.1.1 Gambaran Umum Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal	75
4.2 Analisis Data	80
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	81
4.4 Uji Analisis Regresi.....	86
4.5 Pengujian Hipotesis	90
4.6 Hasil Pengukuran Indeks Maqasid Syariah (IMS)	95
4.7 Diskusi hasil peran Indeks Maqasid Syariah (IMS) terhadap indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal berdasarkan data dan teori Bedoui.....	116
BAB V.....	121

KESIMPULAN DAN SARAN	121
5.1 Kesimpulan.....	121
5.2 Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	133



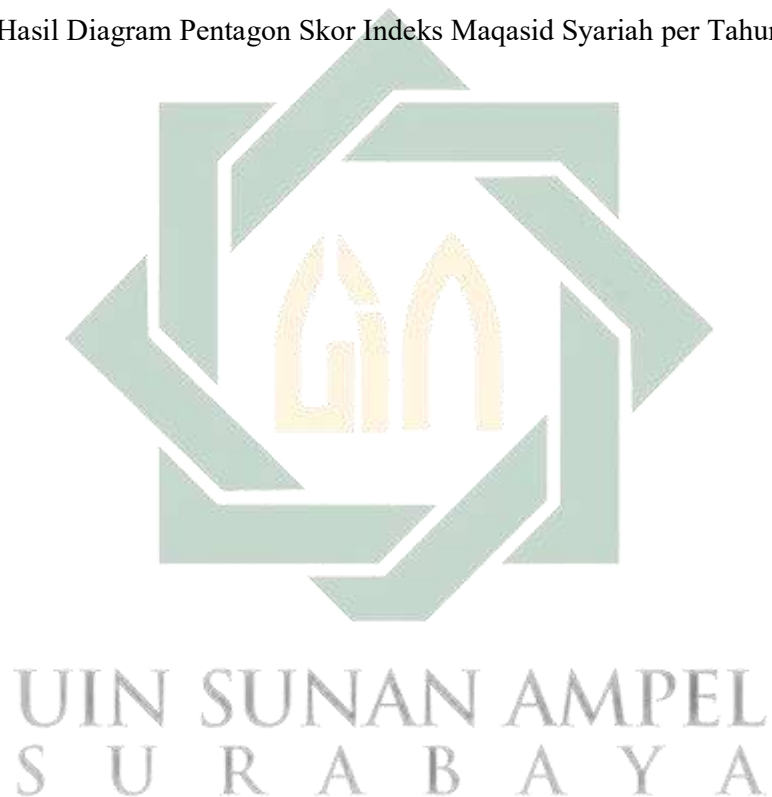
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu	52
Tabel 2. 2 Alur Kerangka Konseptual.....	57
Tabel 3. 1 Data Historis DAU, PAD, dan Belanja Modal Kabupaten Bojonegoro (2019–2023).....	65
Tabel 4. 1 Dana Alokasi Umum Kabupaten Bojonegoro (2019-2023).....	76
Tabel 4. 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro (2019-2023).....	77
Tabel 4. 3 Belanja Modal Kabupaten Bojonegoro (2019-2023)	79
Tabel 4. 4 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	80
Tabel 4. 5 Hasil Uji Kolomogorov-Smirnov	83
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	84
Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi	85
Tabel 4. 8 Hasil Uji Hetersokedastisitas	86
Tabel 4. 9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	87
Tabel 4. 10 Moderated Regression Analysis (dengan Moderasi).....	88
Tabel 4. 11 Uji T atau Uji Parsial	90
Tabel 4. 12 Uji T dengan Moderasi	92
Tabel 4. 13 Hasil Uji F Atau Uji Simultan.....	93
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	94
Tabel 4. 15 Skor IMS Tahun 2019.....	96
Tabel 4. 16 Skor IMS Tahun 2020.....	98
Tabel 4. 17 Skor IMS Tahun 2021.....	100
Tabel 4. 18 Skor IMS Tahun 2022.....	103
Tabel 4. 19 Skor IMS Tahun 2023.....	106
Tabel 4. 20 Rata-Rata Skor Per Dimensi IMS dan Skor Tahunan IMS.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tren Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019–2023.....	2
Gambar 3. 1 Lima Pilar Pentagon Berbentuk Kinerja Indeks Maqasid Syariah.....	74
Gambar 4. 1 Histogram Normalitas.....	82
Gambar 4. 2 Uji Normalitas dengan Normal P-Plot	82
Gambar 4. 3 Hasil Diagram Pentagon Skor Indeks Maqasid Syariah per Tahun.....	112



DAFTAR PUSTAKA

- Abozaid, A. &. (2007). The Challenges of Realizing Maqasid al-Shari'ah in Islamic Banking and Finance. IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance.
- Al-Bukhari, A. (2020). Integrasi Maqasid Syariah dalam Kebijakan Publik Islam. Jakarta: Kencana.
- Al-Qaradawi, Y. (2011). Fi Fiqh al-Daulah fi al-Islam: Ma'alim Manhaj al-Hukm fi al-Islam. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Antonio, M. S. (2020). *Maqasid Shariah-Based Performance Measurement for Islamic Economic Institutions*. Kuala Lumpur: Islamic Research and Training Institute.
- Antonio, M. S. (2021). Indeks Maqasid Syariah dalam Pengukuran Kinerja Pembangunan Berbasis Syariah. Jakarta: IDEAS.
- Aprianingsih, D. (2023). *Pengukuran Kesejahteraan Daerah Berbasis Indeks Maqashid Syariah di Aceh, Bengkulu, dan Sumatera Barat*. Tesis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ardiani, A. N. F. (2022). *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2020)* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang). Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi.
- arif, S. (2015). analisis ekonomi islam tentang pengembangan objek wisata sebagai sumber pendapatan asli daerah. *skripsi, ekonomi dan bisnis islam (lampung, IAIN raden intan)*, 34-35.
- Arifin. (2021). Ekonomi Publik dan Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

- Ascarya & Yumanita, D. (2016). The Role of Maqashid al-Shariah in the Islamic Public Finance Policy. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2(1), 1-24.
- Asutay, M. (2013). Islamic Moral Economy as the Foundation of Islamic Finance. *Islamic Finance in Europe*, 55–68.
- Asy-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Ayumiati. (2024). Budget management of the Aceh Government: An analysis of the Maqāṣid al-sharī'ah approach. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1), 101–120. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/19886>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro. (2024). *Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bojonegoro 2019–2023*. <https://www.bpkad.bojonegorokab.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2019–2023). *Bojonegoro dalam Angka*. Bojonegoro: BPS.
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173–1182.
- Bedoui, H. E. (2011). Measuring the Maqasid of Islamic Law: A Multi-Dimensional Index Approach. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*.

- Bedoui, H. E. (2011). Performance and Maqasid al-Shariah's Pentagonal in Islamic Banking: A Theoretical Framework. Munich Personal RePEc Archive. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/45136/>.
- Bedoui, H. E. (2011). The Maqasid al-Shari'ah Index as a Performance Measure for Islamic Banking Institutions: Theory and Application. Munich Personal RePEc Archive.
- Bedoui, H. E. (2015). Performance and Maqāṣid al-Sharī'ah's pentagon-shaped ethical measurement. *Humanomics*, 31(3), 374–394.
- Bedoui, H. E. (2016). Towards a Maqasid al-Shariah Based Development Index. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA).
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. U. (2018). Islamic Financial System and Economic Development. *Islamic Development Bank*.
- Darmawan. (2019). Efektivitas Fiskal Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Deepublish.
- Darwanto & Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.
- Dewi, R. (2016). Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah Dalam Persepektif Ekonomi Islam . *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN Raden Intan Lampung)*, 25-27.
- Dewi, S. (2019). Manajemen Keuangan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Dusuki, A. W. (2007). A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid al-Shari'ah in Islamic Banking and Finance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, .
- A).

- Dusuki, A. W. (2019). *Shariah and Social Impact: A New Perspective in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: ISRA.
- Efektivitas A, Kampung K, Di M, et al. *Analisis Efektivitas Kebijakan Kampung Madani Di Surabaya Melalui Pendekatan Maqashid Syariah Berdasarkan Teori Houssem Eddine Bedoui Cover Judul.*; 2024.
- Fitriyah, S., & Fauzy, M. Q. (2017). Politik anggaran pemerintah daerah perspektif Maqasid Syari'ah: Studi analisis sektoral pada APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2013–2015. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(12), 991–1008. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/6960>
- Gerungan, H. P., Saerang, D. P. E., & Ilat, V. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2017). *Stabilisasi Fiskal Daerah Melalui Kebijakan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, A. &. (2019). *Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryamto, M. L. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dengan Pandemi Covid-19 sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019–2020* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang). Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi.

- Hasanah, S., & Handayani, N. (2020). *Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik, 10(2), 95–104.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Ibn ‘Ashur, M. a.-T. (2006). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa’is.
- Indonesia., K. K. (2020). *Dana Perimbangan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Irsyadi, M. A. (2014). *Analisi Pengaruh Dana alokasi Umum terhadap Belanja Modal*. *Jurnal Ekonomi Daerah*.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Kasri, R. A. (2021). *Maqasid Al-Shariah and Public Finance: An Islamic Economic Perspective*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Petunjuk Teknis Dana Alokasi Umum dan Dana Transfer*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Khulwani, I., Rinofah, R., & Sari, P. P. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY Tahun 2016–2020*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 4(1).

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2: Laporan Realisasi Anggaran*. Jakarta: KSAP.
- Keuangan, D. J. (2020). *Dana Perimbangan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kurniasih, H., & Yani, A. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 14(1), 34-45.
- Kusufi, M. S. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Novitasari, D. (2023). *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2014–2020*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1), 21–33.
- Niode, A. O. (2013). pengaruh pendapatan asli daerah terhadap DAK, dan pertumbuhan ekonomi di sulawesi selatan. *skripsi, ekonomi pembangunan, universitas sam ratulangi* , 247-248.
- Oni sahrani, A. A. (2016). *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*. 1.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Prasetyo, D. A., & Rusdi, D. (2021). *Pengaruh DAU, DAK, SiLPA, PAD, dan DBH terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Rahayu, H. A., Masruroh, A., & Syarifudin. (2022). Analisis Kinerja PT. Bank Syariah Indonesia dengan Metode *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)* dan *Maqashid Sharia Index (MSI)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2396–2404.
- Rahmiyati, B. (2022). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bogor* (Skripsi Sarjana, Universitas Pakuan, Bogor). Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 130. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salsabila, T. U. (2024). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal di Indonesia Tahun 2018–2022* (Skripsi Sarjana, Universitas Tidar, Magelang). Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi.
- Saragih. (2019). *Keuangan Publik dan Pajak Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 46-58.

- Silalahi, S. K., Lumbantobing, L., & Manalu, D. (2023). *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 14(2), 115–128.
- Siti, H., & Nur, H. (2020). *PAD, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jatim*. Jurnal Ekonomi Regional, 5(3), 112–122.
- Solikin, A., Qulub, S. T., Damanhuri, A., Sopwan, N., & Rohman, H. (2023). Hifz Al Aql dan Penerapan Open-Ended Question dalam Materi Konsep Arah Kiblat pada Mata Kuliah Matematika Astronomi. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 1355–1376. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.3243>
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulaiman, W. (2020). *Pengaruh Rasio Kemandirian, Tingkat Ketergantungan, dan Kekayaan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dengan Variabel Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Variabel Moderasi* (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Semarang). Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sularso. (2018). *Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sumirno. (2008). *Dasar-Dasar Pajak dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Silalahi, S. K., Lumbantobing, L., & Manalu, D. (2023). *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 14(2), 115–128.
- Siti, H., & Nur, H. (2020). *PAD, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jatim*. Jurnal Ekonomi Regional, 5(3), 112–122.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suandy, E. (2021). *Perpajakan Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suryani, F. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau*. PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi FKIP UIR, 6(1).
- Syukri, & Hinaya. (2019). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan*. JEMMA: Journal of Economic, Management and Accounting, 2(1).
- Syaiful. (2006). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ulya, Z. (2023). *Pandangan Dosen Prodi HKI UINSA Surabaya terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah*. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 26(1), 26–42.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yusuf, M. Q. (2013). *Etika dan Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.